

LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshot Bimbingan Skripsi

NIM	2018041055	Nama Mahasiswa	SHINTA ANDREA PUSPA
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	141 SKS
Tgl. Mulai	20 Mei 2022	Judul Tugas Akhir	JURNALISME BERPERSPEKTIF KORBAN PADA PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL LAKI-LAKI DI PORTAL MEDIA ONLINE (Analisis Framing Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com Periode September 2021 – Januari 2022)

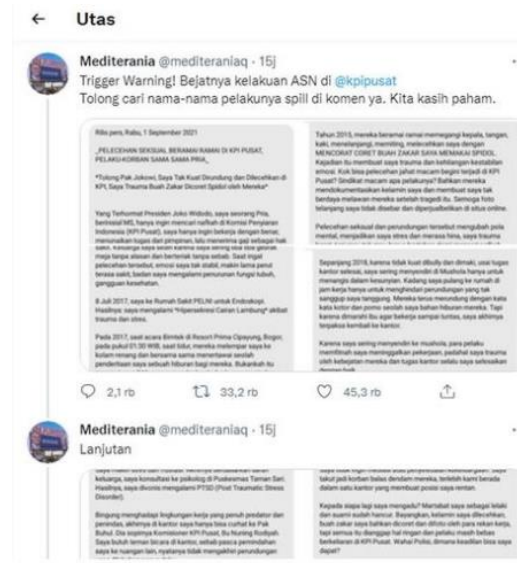
No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	16 Februari 2022	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Bimbingan BAB 1	✓	
2	15 Maret 2022	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Bimbingan BAB 1 dan BAB 2	✓	
3	16 Maret 2022	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Bimbingan BAB 1, 2 dan 3	✓	
4	17 Maret 2022	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Bimbingan BAB 1	✓	
5	17 Maret 2022	Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.Ikom.	Bimbingan BAB 1	✓	
6	17 Mei 2022	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Bimbingan BAB 1 – 4	✓	
7	19 Mei 2022	Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.Ikom.	BAB 1, 2, dan 3	✓	
8	23 Mei 2022	Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.Ikom.	Bimbingan BAB 3, 4 dan 5	✓	

Lampiran 2. Artikel Kompas.com dan Suara.com

➤ Artikel Kompas.com

1. <https://amp.kompas.com/tren/read/2021/09/02/150500265/viral-tweet-tentang-pegawai-kpi-alami-pelecehan-seksual-dan-perundungan>

Viral Twit tentang Pegawai KPI Alami Pelecehan Seksual dan Perundungan



Kompas.com - Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menceritakan kisahnya dalam sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan tangkapan layarnya viral di media sosial Twitter, Rabu (1/9/2021). Twit yang viral itu dibuat oleh akun @mediteraniaq pada Rabu (1/9/2021).

Hingga Kamis (2/9/2021) unggahan tersebut telah disukai lebih dari 45.300, dibagikan ulang lebih dari 33.200 kali, dan dikomentari lebih dari 2.100 kali. Salah satu pernyataan korban adalah sebagai berikut: "Tolong Pak Joko Widodo, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI, saya trauma buah zakar dicoret spidol oleh mereka."

Korban menceritakan dirinya dirundung atau di-bully selama sekitar 2 tahun, antara 2012-2014. Yang bersangkutan mulai bekerja di KPI Pusat sejak 2011. Dikatakan bahwa pelecehan, pemukulan, dan lainnya tidak terhitung jumlahnya.

Korban adalah seorang laki-laki dan para pelaku lebih dari satu orang dan berjenis kelamin laki-laki juga. Puncaknya ketika 2015, saat itu korban dilecehkan ramai-ramai dan menyebabkan korban trauma hingga jatuh sakit.

Mirisnya, laporannya pada 2019 diremehkan oleh Polsek Gambir. Polisi mengatakan masalah yang dialaminya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dengan melapor ke atasannya. Hal itu hanya membuatnya dipindahkan ke ruangan lain yang dianggap lebih aman.

Bagaimana tanggapan KPI setelah kasus ini viral di Twiter?

Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan, saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. "Betul (dalam proses penyelidikan). Polisi sejak semalam juga sudah turun tangan dengan menemui korban," kata Mulyo kepada Kompas.com, Kamis (2/9/2021).

Pihak KPI juga mengatakan bahwa pihaknya prihatin terhadap adanya perbuatan tersebut di lingkungan KPI. "Turut prihatin dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapa pun dan dalam bentuk apa pun," kata dia.

Dia mengatakan sebelumnya pihak KPI juga telah melakukan langkah-langkah investigasi internal, dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Menurutnya, KPI mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika para pelaku terbukti bersalah, maka mereka akan ditindak tegas. "Menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan (bullying) terhadap korban, sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya.

Jamin berikan perlindungan pendampingan hukum

Sementara itu terhadap korban, KPI menjamin akan memberikan perlindungan pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologi terhadap korban.

Terkait dengan berapa jumlah pelaku dan siapa saja pelakunya, pihaknya mengatakan masih menginvestigasinya. "Kami masih investigasi untuk mendapatkan keterangan kepada korban dan terduga pelaku. Kami menyerahkan proses ini berjalan beriring dengan penyidikan polisi," tuturnya.

Saat ditanya apakah benar kasus itu merupakan kasus yang sudah lama terjadi, dia menyatakan tidak mengetahuinya, karena baru masuk 2019. Dia menambahkan para komisioner sedang meminta keterangan termasuk dari sekretariat.

2. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/01/19554381/dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-pegawai-kpi-komnas-ham-yang-bersangkutan>
Pelecehan Seksual terhadap Pegawai KPI, Komnas HAM: Yang Bersangkutan Sudah Mengadu Sejak 2017



JAKARTA, KOMPAS.com – Dugaan pelecehan seksual yang dialami pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berinisial MS telah diketahui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021). Beka menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan dari MS sejak tahun 2017. Namun karena ada indikasi perbuatan pidana MS diminta untuk melaporkan kasusnya itu ke pihak kepolisian. “Benar yang bersangkutan mengadu ke Komnas HAM via email sekitar Agustus–September 2017,” tutur Beka.

Beka mengatakan bahwa pihaknya akan menangani kasus tersebut setelah menunggu perkembangan penanganan dari pihak kepolisian. “Komnas HAM akan tangani kasus tersebut apabila yang bersangkutan mengadu lagi ke Komnas HAM terkait perkembangan penanganan kasus yang ada setelah dari kepolisian maupun pihak lain,” ungkap dia. Saat ini, Komnas HAM sudah menjalin komunikasi dengan Komisioner KPI untuk menyelesaikan kasus ini. “Semoga kasus ini segera terang, ketemu solusinya dan korban dipulihkan,” pungkas Beka.

Diketahui seorang pegawai KPI berinisial MS mengaku telah mendapatkan perundungan dan pelecehan seksual sejak tahun 2012 hingga 2014. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, MS menyebut bahwa perundungan dan pelecehan seksual itu dilakukan oleh sejumlah pegawai di KPI Pusat.

Di sisi lain Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan investigasi atas kasus tersebut. Melalui keterangan tertulis, Mulyo menyebut bahwa KPI juga mendukung agar kasus ini dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Mulyo menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan perlindungan pada korban. “Memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan secara psikologi terhadap korban,” imbuh dia.

3. <https://amp.kompas.com/tren/read/2021/09/03/065000065/ramai-soal-dugaan-pelecehan-seksual-pegawai-komisi-penyiaran-ini-tanggapan>

Ramai Soal Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai Komisi Penyiaran, Ini Tanggapan KPI



KOMPAS.com - Ramai twit soal dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami oleh seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kasus tersebut muncul ke permukaan setelah dicuitkan oleh akun bernama @mediteraniaq pada Rabu (1/9/2021). Disebutkan bahwa korban yang merupakan pegawai KPI Pusat sejak 2011 tersebut, mengalami pelecehan, pemukulan, dan perbuatan lainnya. KPI pun angkat bicara mengenai kasus tersebut. Seperti apa responsnya?

Respons KPI

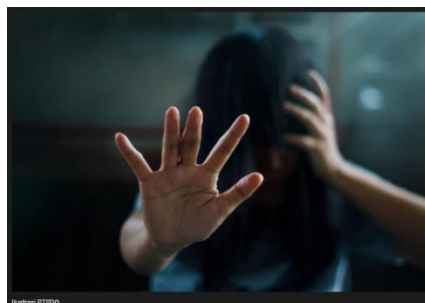
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/9/2021), Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian telah turun tangan dan menemui korban. KPI juga telah melakukan investigasi secara internal, dan meminta penjelasan dari kedua pihak. "Betul (dalam proses penyelidikan). Polisi sejak semalam juga sudah turun tangan dengan menemui korban," kata Mulyo.

Pihak KPI sendiri menyatakan keprihatinannya atas dugaan kasus pelecehan dan perundungan tersebut. "Turut prihatin dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapa pun dan dalam bentuk apa pun," kata dia.

Lebih lanjut, KPI mendukung pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan dan perundungan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Jika para pelaku terbukti bersalah, maka akan ditindak tegas. "Menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan (bullying) terhadap korban, sesuai hukum yang berlaku," tutur Mulyo. Selain mendukung langkah kepolisian, KPI juga akan memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikologi korban. "Kami masih investigasi untuk mendapatkan keterangan kepada korban dan terduga pelaku. Kami menyerahkan proses ini berjalan beriring dengan penyidikan polisi," tutur dia.

4. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/10/06/18074891/pegawai-kpi-korban-pelecehan-seksual-mengalami-ptsd-suka-tiba-tiba-teriak>

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Mengalami PTSD, Suka Tiba-tiba Teriak



JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pemeriksaan psikologi MS, pegawai KPI yang terduga sebagai korban pelecehan seksual dan perundungan, sudah keluar. "Benar. Pemeriksaan psikologi Korban MS pada Senin 27 September 2021

di LPSK sudah keluar hasilnya," ungkap Kuasa Hukum MS, Muhammad Mualimin dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021). Mualimin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari psikolog LPSK, disimpulkan bahwa MS mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD).

Selain itu, disebutkan juga bahwa MS belum bisa berdamai dengan masa lalunya. "Masih tidak percaya mengapa ia bisa jadi korban pelecehan seks dan perundungan, serta cenderung paranoid karena membayangkan hal buruk yang akan terjadi padanya di berbagai situasi," jelas Mualimin.

Dalam hal emosi, lanjut dia, hasil psikologi mengatakan MS tampak emosional, mudah histeris, dan menangis saat menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. "Ia merasa bodoh karena tidak bisa membantu dirinya sendiri atas kejadian yang dialaminya saat ini," lanjut dia.

Selain itu, perilaku MS juga disebut sering tiba-tiba berteriak sendiri hingga mengagetkan sekitarnya. "Ia mudah stres, sulit konsentrasi, dan kurang mampu mengontrol dorongan dalam dirinya," ujar dia.

Dari hasil psikologi tersebut, disimpulkan bahwa MS membutuhkan intervensi psikologis dan dukungan keluarganya.

5. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/15/14023121/demi-hindari-perundungan-netizen-kpi-tak-mau-banyak-komentar-soal-kasus>

Demi Hindari Perundungan Netizen, KPI Tak Mau Banyak Komentar soal Kasus Pelecehan Pegawai



JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Umri menyatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu proses hukum di kepolisian terkait dugaan pelecehan seksual serta perundungan antara sesama pegawai KPI.

Untuk itu, Umri enggan berkomentar banyak saat ditanya detail kelanjutan kasus tersebut. Ia meminta media bersabar dan ikut menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Polres Jakarta Pusat. Ia khawatir, KPI akan terus menjadi sasaran perundungan warganet jika banyak memberikan statemen terkait kasus itu. "Nanti deh karena ini sedang proses ya, ini sedang proses hukum jadi saya mohon teman-teman semua untuk bersabar karena kami menghindari statemen-statemen dari netizen ya yang luar biasa ke kami," kata Umri usai memberi keterangan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021).

Umri berharap proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Pusat bisa cepat rampung sehingga kasus itu menjadi terang benderang. "Kami dari KPI menginginkan sekali proses ini selesai cepat lewat proses hukum. Sehingga apa? Ketika itu berakhir dengan proses hukum jadi kami enggak ada yang benar atau salah, sumbernya dari situ," kata dia. Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo juga menyatakan, pihaknya tak melakukan banyak upaya dalam menangani dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi antar pegawai. Sebab, KPI menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu pada pihak kepolisian.

Saat ditanya soal investigasi internal yang dilakukan KPI, Mulyo menjawab bahwa penyelidikan itu hanya bertujuan untuk kepentingan instansi. Misalnya apabila KPI ditanya oleh Komisi I DPR mengenai kasus pelecehan itu, pihak sudah memiliki jawaban. "Kalau kami sama sekali tidak tahu kan rasanya aneh, loh ini gimana sih diduga terjadi di KPI kok tidak bisa menyampaikan hal itu. Kan kami juga dilihat salah. Jadi informasi dasar sajalah yang kami gali, tapi proses dan detail lanjut berkaitan dengan pendalaman dan penyidikan terhadap kasus itu kami serahkan kepada kepolisian," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual di KPI itu mencuat setelah terduga korban, MS, membuat surat terbuka yang kemudian viral pada 1 September ini. MS dalam tulisan itu mengaku sudah menjadi korban perundungan oleh rekan kerjanya sejak bekerja di KPI pada 2012.

Pada 2015 dia bahkan dilecehkan secara seksual oleh lima orang rekan kerjanya. MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek

Gambir pada 2019. Namun laporannya tak pernah ditindaklanjuti. Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus itu.

KPI telah menonaktifkan delapan terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS untuk mempermudah investigasi. Sementara itu, Polres Jakarta Pusat telah memeriksa lima terlapor yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS pada 2015. Polres Jakarta Pusat juga melibatkan Propam untuk menyelidiki adanya dugaan pembiaran pada laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir.

6. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/03/07270081/kasus-pelecehan-di-kantor-kpi-ketika-polisi-baru-bergerak-setelah-berita>

Kasus Pelecehan di Kantor KPI, Ketika Polisi Baru Bergerak Setelah Berita Viral



JAKARTA, KOMPAS.com - "Apakah harus jadi perempuan dulu supaya polisi serius memproses kasus pelecehan yang saya alami?". Demikian sepenggal kalimat dari surat terbuka yang ditulis MS, seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia. MS mengaku telah menerima tindakan perundungan, perbudakan, hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya sejak ia bekerja di KPI pada 2012 silam.

Salah satu peristiwa pelecehan yang paling membekas terjadi pada 2015. MS yang saat itu sedang bekerja di kantor KPI tiba-tiba dihampiri oleh lima rekan kerjanya. "Mereka beramai-ramai memegang kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencorat-coret buah zakar saya memakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi," kata MS dalam keterangan tertulisnya yang viral.

Peristiwa lain terjadi pada 2017 saat acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor. "Pada pukul 01:30 WIB, saat tidur, mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama sama menertawai seolah penderitaan saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satupun yang membela saya," ujar MS.

Dua kali lapor polisi tanpa hasil

MS sempat berusaha melindungi diri dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan polisi. Hanya saja laporan tersebut tidak ditanggapi secara serius. MS pertama kali memberanikan diri untuk mengadukan ke Polsek Gambir pada 2019. Akan tetapi kala itu MS malah diminta petugas untuk mengadukan terlebih dahulu kepada atasan supaya permasalahannya diselesaikan secara internal. "Petugas malah bilang, 'Lebih baik adukan dulu saja ke atasan. Biarkan internal kantor yang menyelesaikan'," ucapnya. MS pun mengikuti saran dari polisi itu dengan mengadu ke atasannya. Namun, ia hanya dipindahkan ruangan, sementara terduga pelaku pelecehan tidak pernah ditindak.

Berselang setahun kemudian, karena perundungan masih terus terjadi, MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir, berharap laporannya diproses dan para pelaku dipanggil untuk diperiksa. "Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, 'Begini saja pak, mana nomor orang yang melecehkan bapak, biar saya telepon orangnya'," tulis MS.

Dalam surat terbuka itu, MS pun turut meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Sebagai warga negara Indonesia bukankah saya berhak mendapatkan perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi korban bully dan pelecehan?" tulis MS.

Polisi bergerak

Surat terbuka yang ditulis MS itu dengan cepat menyebar di kalangan warganet. Komisioner KPI langsung membentuk tim investigasi internal guna menyelidiki kasus dugaan seksual dan perundungan yang dialami MS.

Komisioner KPI Nuning Rodiyah juga langsung mendampingi MS membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (1/9/2021) malam pukul

23.30 WIB. MS melaporkan lima pegawai KPI yang telah melecehkannya pada 2015 silam, yakni RM, FP, RT, E0 dan CL.

Kelimanya dilaporkan telah melakukan tindak pidana merusak kesopanan dengan kekerasan dan atau merusak kesopanan di depan umum, serta perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 281 juncto 335 KUHP.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardhana membenarkan MS telah membuat laporan tersebut. "Ia benar yang bersangkutan sudah melapor," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).

Polisi pun langsung bergerak cepat mengusut kasus ini. Polres Jakpus telah menjadwalkan pemanggilan kepada 5 pegawai KPI yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap MS. "Mulai Senin akan kita panggil para terlapor," kata Wisnu.

Sebelum memanggil para terlapor, polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi untuk menggali kasus ini. Sejauh ini sudah ada satu saksi yang diperiksa, yakni karyawan KPI yang bekerja sebagai sopir. "Dalam waktu dekat kami juga berencana memanggil psikolog yang selama ini memeriksa kondisi MS," kata Wisnu.

Polisi bantah keterangan korban

Meski bergerak cepat mengusut kasus ini, namun polisi menyanggah keterangan korban yang mengaku telah melapor sebanyak dua kali ke Polsek Gambir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan, MS baru membuat laporan pelecehan yang dialaminya ke Polres Jakpus setelah kisahnya viral. "Saudara MS tidak pernah membuat, atau datang ke Polsek Gambir membuat laporan polisi," ujar Yusri.

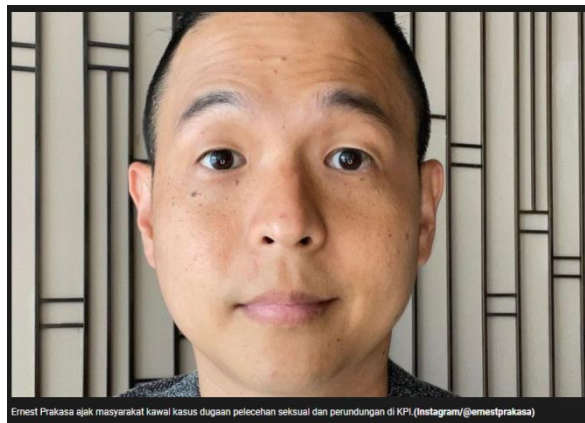
Yusri juga menegaskan bahwa surat terbuka yang viral itu bukan ditulis oleh MS. Pengacara MS, Muhammad Muallamin mengakui surat terbuka itu tak ditulis langsung oleh korban. Surat itu ditulis oleh Muallamin selaku kuasa hukum, namun dibuat berdasarkan cerita langsung dari MS dan atas persetujuan MS. "Jadi memang bukan MS langsung yang menuliskan, tapi berdasarkan keterangan dan persetujuan dia," kata Muallamin.

Mualamin pun membantah keterangan Yusri bahwa kliennya tak pernah melapor ke Polsek Gambir. Ia memastikan bahwa kliennya pernah melapor, namun tidak ditanggapi karena tak memiliki cukup bukti. "Ia betul (pernah buat laporan ke Polsek Gambir). Ya jadi ditanya (oleh polisi), 'waktu dilecehkan bareng-bareng itu buktinya apa'. Loh sebagai korban ya tidak punya bukti visual. Foto atau apa ya tidak sempat," kata Mualimin. "Justru korban yang difoto oleh pelaku dan tidak tahu foto itu di mana," sambungnya.

7. <https://amp.kompas.com/hype/read/2021/09/11/081309366/korban-dugaan-pelecehan-di-kpi-malah-diminta-cabut-laporan-ernest-prakasa>

Korban Dugaan Pelecehan di KPI Malah Diminta Cabut Laporan, Ernest

Prakasa: Kita Nggak Bisa Diam Aja



JAKARTA, KOMPAS.com - Komika sekaligus sutradara, Ernest Prakasa mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ajakan ini datang setelah ramai pemberitaan soal korban, MS, yang diminta mencabut laporan terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI.

Mengetahui adanya upaya damai dengan syarat yang terkesan merugikan korban, Ernest tak mau jika nantinya terduga pelaku terus bertindak seolah MS tidak mengalami penderitaan. "Saya mau ajak teman-teman untuk kawal terus kasus ini, jangan sampai kita biarkan pelaku-pelaku memaksa korban untuk bertindak seolah-olah derita yang dialami tidak pernah terjadi," kata dia sebagaimana dikutip Kompas.com dari Instagram @ernestprakasa, Sabtu (11/10/2021). Belum lagi terduga pelaku juga berencana melaporkan balik korban atas tindakan cyber

bullying karena kasus ini viral dan jadi perbincangan nasional. "Kita nggak bisa diam aja," ujar Ernest.

Melihat banyaknya upaya pembelaan yang dilakukan oleh terduga korban, termasuk saat melangsungkan pertemuan dengan MS di kantor KPI, Ernest mengaku ragu jika KPI berniat menyelesaikan kasus ini dengan semestinya. Padahal, Ernes menyebut pada awalnya ia berpikir tak adil jika dirinya menyudutkan lembaga KPI, padahal yang melakukan dugaan pelecehan dan perundungan hanya segelintir dari ratusan pegawai. "Diawal gue mikir, kayanya nggak terlalu adil juga kalo kayak gitu," ucap Ernest.

Apalagi, di awal, KPI juga terlihat proaktif membantu korban. Ketua KPI, Agung Suprio saat hadir di podcast Deddy Corbuzier bahkan mengaku akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun faktanya, terduga pelaku justru meminta korban mencabut laporan dan meminta mengatakan pada publik bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada. Ernest menilai rentetan tindakan terduga pelaku adalah sebagian upaya KPI untuk meredam kasus ini dari publik. "KPI sampai saat ini bukan terlihat seperti lembaga yang serius mengusut kasus, tapi sangat terlihat seperti lembaga yang berusaha meredam kasusnya," ucap Ernest.

Sutradara film "Imperfect" itu juga menilai KPI tidak menunjukkan rasa peduli mereka terhadap korban yang sedang mengalami trauma. "Tanpa peduli nasib korbannya, tanpa peduli trauma korban," tutur dia.

8. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/29/15581101/komnas-ham-beri-rekomendasi-kepada-kpi-atas-kasus-dugaan-perundungan-dan>

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, MS. Rekomendasi itu berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan diberikan kepada Ketua KPI Pusat, Agung Suprio.

Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran hak asasi dalam kasus MS. “Ketua KPI Pusat harus memberi dukungan kepada MS baik secara moral ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Senin (29/11/2021).

Kemudian, Komnas HAM mendesak KPI untuk kooperatif dengan kepolisian dalam mempercepat proses penegakan hukum. Beka juga menyampaikan, Ketua KPI Pusat harus menindak tegas bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran berupa perundungan dan pelecehan seksual. “Selain itu juga mengeluarkan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat,” kata dia.

Dari sisi pencegahan, Beka menerangkan, KPI perlu membuat pedoman, edukasi, monitoring hingga evaluasi terkait penanganan dan pemulihan tindak perundungan dan kekerasan seksual. “Serta menyiapkan anggaran sarana, prasarana dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang mendukung pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual di tempat kerja serta pemulihan korban,” imbuhnya.

Terkait kasus MS, Komnas HAM menyimpulkan KPI gagal memberikan jaminan atas lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan aman dari tindakan perundungan dan pelecehan seksual. Beka menjelaskan, kesimpulan itu berdasarkan tiga indikator. Pertama tidak ada perangkat dan pedoman terkait pencegahan perundungan dan pelecehan seksual. Dua, kebiasaan melakukan perundungan yang dianggap lelucon dan bahan candaan di lingkungan kerja divisi Visual Data KPI Pusat. Tiga, akibat kebiasaan itu, Komnas HAM menduga bahwa perundungan sebenarnya terjadi tidak hanya pada MS, namun juga pegawai lainnya. Hanya saja perkara itu tidak diungkap karena perundungan seolah-olah telah menjadi kebiasaan untuk saling mengakrabkan antar-pegawai.

Adapun perkara MS mencuat setelah pengakuannya melalui keterangan tertulis viral di media sosial sejak 1 September lalu. MS mengaku telah mengalami perundungan sejak 2015, kemudian pelecehan seksual pada 2017. Ia lantas melaporkan lima rekannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini perkara MS masih diselidiki oleh kepolisian. Sementara Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi.

9. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/12/30/21111731/pegawai-kpi-korban-pelecehan-divonis-depresi-mayor-karena-cemaskan>

Pegawai KPI Korban Pelecehan Divonis Depresi Mayor karena Cemaskan Kasusnya yang Mandek



JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terduga korban pelecehan seksual dan perundungan, MS, selesai menjalani psikoterapi di Poliklinik Stres Pascatrauma Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2021).

Kuasa hukum MS, Muhammad Mualimin mengatakan, kondisi kliennya memburuk karena mencemaskan lambatnya proses hukum kasusnya di Polres Jakarta Pusat. "Baru-baru ini, MS divonis depresi mayor sehingga dosis obat yang harus dikonsumsi bertambah," ujar Mualimin dalam keterangannya, Kamis ini.

Mualimin menambahkan, kejiwaan MS seringkali tidak stabil dan depresi meningkat. Akibatnya, MS minum empat jenis pil setiap harinya. "Menjelang pergantian tahun, MS bertanya tanya mengapa kasusnya mandek, sedangkan kasus viral lain seperti bunuh diri Novia Widyasari, Dosen Cabul di Unri, tabrak lari di Nagreg, sudah ada tersangkanya," ujar Mualimin.

Di tengah banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia belakangan ini, MS takut tidak mendapat keadilan hukum. MS, lanjut Mualimin, gelisah karena

sejak kasusnya mencuat pada 1 September 2021, hingga akhir tahun ini tidak ada perkembangan apa pun dari kasusnya. "Menyongsong tahun baru 2022, MS juga tidak tahu apakah kontrak kerjanya di KPI Pusat bakal diperpanjang," ujar Muallimin.

Sementara itu, pegawai Komisi Penyiaran KP yang menjadi terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS sampai saat ini belum mendapat sanksi tegas. Bahkan, para terduga pelaku justru telah menjalani psikotes untuk proses perpanjangan kontrak untuk tetap bekerja di KPI pada 2022. Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012. Bahkan, ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di ruang kerja. MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, namun laporannya tak pernah ditindaklanjuti. Setelah surat terbukanya viral, kepolisian baru bergerak mengusut kasus ini.

Polres Jakpus telah memeriksa 5 terlapor yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS. Propam juga dilibatkan untuk menyelidiki adanya dugaan pembiaran pada laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir.

10. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/01/07/19214511/pegawai-kpi-korban-pelecehan-diperpanjang-kontraknya-kini-berkantor-di>

Pegawai KPI Korban Pelecehan Diperpanjang Kontraknya, Kini Berkantor di Kominfo



MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) korban pelecehan seksual dan perundungan telah menandatangani surat perpanjangan kontrak. Ia akan tetap bekerja di KPI di tahun 2022. "Alhamdulillah, MS tadi barusan menandatangani Surat Perpanjangan Kontrak Kerja di KPI Pusat," kata kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022). Muallimin bersyukur akhirnya KPI tetap mempertahankan MS. Di sisi lain, ia juga lega karena para terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Guna menghindari trauma berkepanjangan, untuk sementara MS akan ditempatkan dan bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga psikisnya pulih. "Meski berkantor di Kominfo, status MS tetap sebagai pegawai kontrak KPI Pusat dengan masa kerja selama 1 tahun kedepan," sambung Muallimin.

Di sisi lain, MS juga masih berharap Polres Jakarta Pusat untuk mengusut tuntas kasus yang dialaminya dan segera menetapkan para terlapor sebagai tersangka. "Kini MS hanya ingin melihat kinerja Penyidik Polres Jakarta Pusat menuntaskan beban pembuktian agar kasus segera disidangkan dan pelaku yang bersalah dihukum setimpal," kata Muallimin.

Kontrak 8 terduga pelaku pelecehan tak diperpanjang

Terpisah, KPI membenarkan sudah memperpanjang kontrak MS. Sebaliknya, 8 terduga pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS tak diperpanjang kontraknya. Komisioner KPI Hardly Stefano Fenelon mengatakan, delapan orang terduga pelaku berinisial RM alias O, TS dan SG, RT, FP, EO, CL, serta TK, tidak lagi dikontrak sebagai pegawai KPI terhitung 1 Januari 2022. "Benar, para terduga pelaku sudah tidak lagi dikontrak sebagai pegawai KPI. Terhitung 1 Januari 2022," kata Stefano di Jakarta, Jumat (7/1/2022), dikutip dari Antara.

Stefano menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan KPI untuk tidak memperpanjang kontrak kerja. Pertama, hasil penyelidikan Komnas HAM menyakini bahwa benar korban mengalami kejadian sebagaimana dilaporkan. Kedua, KPI menilai diperlukan upaya pemulihan terhadap korban, salah satunya dengan tidak membiarkan korban berada dalam lingkungan kerja

yang sama dengan terduga pelaku. Ketiga, laporan korban saat ini sedang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan oleh kepolisian. "Oleh sebab itu dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sebaiknya para terduga pelaku terlebih dahulu berkonsentrasi menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan," kata Stefano. Kasus pelecehan dan perundungan di lingkup KPI Pusat terkuak usai MS membagikan pernyataan bahwa dirinya mengalami perundungan dan pelecehan dari rekan-rekan sekerjanya pada periode 2012-2020.

Usai pernyataan itu viral, MS pun memberanikan diri melakukan pelaporan ke Polrestro Jakarta Pusat atas insiden nahas yang harus dialaminya dalam hitungan waktu tahunan itu. Ia pun sudah menghadiri pemeriksaan untuk menyelesaikan kasusnya, termasuk memenuhi undangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lalu pada akhir November 2021, Komnas HAM akhirnya menyampaikan kesimpulan bahwa MS benar telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual oleh rekan sekantornya.

➤ **Artikel Suara.com**

1. <https://amp.suara.com/news/2021/09/01/174748/heboh-pegawai-pria-ngaku-diperbudak-hingga-kerap-ditelanjangi-pimpinan-kpi-gelar-rapat>

Heboh Pegawai Pria Ngaku Diperbudak Hingga Kerap Ditelanjangi, Pimpinan KPI Gelar Rapat



Heboh Pegawai Pria Ngaku Diperbudak hingga Kerap Ditelanjangi, Pimpinan KPI Gelar Rapat. Ilustrasi pelecehan seksual (pixabay/Gerd Altmann)

Suara.com - Sebuah pesan berantai dalam aplikasi pesan instan WhatsApp soal pegawai kontrak Komisi Penyiaran Indonesia ([KPI](#)) yang mengaku mendapatkan [perundungan](#) dari teman kerjanya sejak 2012. Mengenai hal tersebut, KPI mengaku bakal memberikan keterangan pers.

Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menggelar rapat pleno. Namun ia tidak menyebut apakah rapat pleno tersebut berhubungan dengan pengungkapan tindakan penganiayaan serta pelecehan yang dialami oleh pegawai kontrak berinisial MS. "(Kami, red) sedang pleno dulu. Nanti ketua yang akan berikan statement," kata Mimah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/9/2021).

Sebelumnya, seorang pria berinisial MS mengaku telah menerima perundungan oleh rekan kerjanya pada tahun 2012. Ia mendapatkan tindakan pemukulan, makian, pelecehan hingga bahkan pelaku menelanjinginya dan mencorat-coret testis miliknya. Cerita MS tersebut beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp dengan maksud meminta perhatian akan adanya tindakan [pelecehan seksual](#) di mana korban dan pelaku adalah sama-sama pria.

Suara.com berusaha berkomunikasi dengan pria yang dimaksud melalui chat WhatsApp. MS membenarkan apabila pesan berantai itu memang berasal darinya. "Iya benar tulisan saya, kak," kata MS melalui pesan singkat kepada Suara.com, Rabu (1/9/2021). MS mengaku dirinya merupakan pegawai kontrak di KPI yang bertanggung jawab di divisi Visual Data. Ia mengaku ingin sekali ke luar dari KPI karena sudah tidak kuat menahan perundungan yang dialaminya. "Saya mau resign, sudah enggak kuat lagi," ucapnya.

Kejadian perundungan itu terjadi sepanjang 2021-2014 di mana dalam 2 tahun ia kerap disuruh-suruh untuk melayani rekan kerja. Padahal menurutnya kedudukan mereka setara sebagai pegawai. "Tapi mereka secara bersama sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh," ujarnya. MS menyebut sudah tidak bisa terhitung berapa kali teman-teman kerjanya itu melakukan pelecehan, memukul, memaki tanpa ada perlawanan. Pasalnya ia kerap sendirian sementara rekan kerjanya beramai-ramai melakukan perundungan.

Puncaknya terjadi pada 2015 di mana MS dilecehkan oleh teman-teman kerjanya. Mereka bahkan berani menelanjangi MS. "Tahun 2015, mereka beramai ramai memegang kepala, tangan, kaki, menelanjangi,

memiting, melecehkan saya dengan mencorat-coret buah zakar saya memakai spidol," ucapnya. Kejadian tersebut membuat MS menjadi trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Bahkan menurutnya para pelaku mendokumentasikan tindakan pelecehan tersebut. "Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina, saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah," ungkapnya.

Pada 2016 ia sering jatuh sakit karena mengalami stres akibat perundungan serta pelecehan yang dilakukan teman-teman kantornya. Ia kerap tidak bisa menahan emosi hingga mempengaruhi terhadap daya tahan tubuhnya. MS mengaku berangkat ke Rumah Sakit Pelnis untuk melakukan endoskopi pada 8 Juli 2017. Hasil dari tes kesehatan tersebut, MS mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres.

Pada tahun yang sama, MS juga sempat mengikuti acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor bersama teman-teman kantornya. Ketika tidur, MS dibawa dan dilempar ke kolam renang oleh teman-temannya. Teman-teman kantornya hanya menertawakan MS yang basah kuyup pada pukul 01.30 WIB.

MS sempat mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email pada 11 Agustus 2017. Komnas HAM lantas membalas emailnya pada 19 September 2017 dan berkata bahwa apa yang dialaminya masuk ke dalam kejahatan tindak pidana. Karena itu Komnas HAM menyarankan supaya MS melaporkan ke pihak kepolisian. Ia baru melaporkan ke Polsek Gambir pada 2019. Akan tetapi petugasnya malah berkata agar MS membuat aduan ke pihak atasan terlebih dahulu.

Akhirnya MS pun mengadukan pelaku ke atasannya sembari menangis. Ia menceritakan semua pelecehan dan penindasan yang dialaminya. Pengaduan tersebut berbuah hasil dengan dipindahkannya MS ke ruangan lain yang dianggap 'lebih ramah' ketimbang ruangan sebelumnya.

Namun para pelaku yang diadukan MS sama sekali tidak mendapatkan sanksi. Alhasil, MS mendapatkan cibiran dan penindasan kembali. "Bahkan pernah tas saya di lempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis

"Bangku ini tidak ada orangnya". Perundungan itu terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh," ungkapnya. Atas saran keluarga, MS konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stress dan frustrasi. Dari sana, MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

MS juga berupaya untuk meminta bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris hingga Deddy Corbuzier melalui Instagram pada Oktober 2020 namun hasilnya nihil. Melalui pesan berantai di WhatsApp juga ia meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, Menko Polhukam, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan perlindungan hukum. "Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk resign, tapi sekarang sedang pandemi Covid-19 di mana mencari uang adalah sesuatu yang sulit," ungkapnya. "Lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar, kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik."

2. <https://amp.suara.com/news/2021/09/01/175824/kasus-pegawai-kpi-kerap-ditelanjangi-teman-pria-di-kantor-komnas-ham-akui-terima-aduan-ms>

**Kasus Pegawai KPI Kerap Ditelanjangi Teman Pria di Kantor,
Kantor Komnas HAM**



Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membenarkan pernah menerima aduan dari seorang pegawai kontrak berinisial MS di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang mengalami perundungan dan

pelecehan oleh rekan-rekan kantornya. Komnas HAM berharap pihak KPI Pusat bisa meneruskan kasus tersebut dengan proses hukum.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara mengatakan kalau MS pernah mengirimkan pengaduan melalui email Komnas HAM pada 2017. "Betul yang bersangkutan pernah mengadu via email ke Komnas HAM sekitar bulan Agustus-September 2017 terkait kekerasan seksual yang dialaminya," kata Beka saat dikonfirmasi, Rabu (1/9/2021). Dari hasil analisa Komnas HAM terhadap pengaduan tersebut, MS disarankan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur tindak pidana dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Melihat adanya kasus tersebut, Beka berharap kalau KPI bisa melakukan langkah-langkah internal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Harapannya tentu saja KPI melakukan langkah-langkah di internal mereka dan kemudian menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku supaya korban dapat keadilan dan dipulihkan," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria berinisial MS mengaku telah menerima perundungan oleh rekan kerjanya sejak 2012. Ia mendapatkan tindakan pemukulan, makian, pelecehan hingga bahkan pelaku menelanjinginya dan mencorat-coret testis miliknya. Cerita MS tersebut beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp dengan maksud meminta perhatian akan adanya tindakan pelecehan seksual di mana korban dan pelaku adalah sama-sama pria.

Suara.com berusaha berkomunikasi dengan pria yang dimaksud melalui chat WhatsApp. MS membenarkan apabila pesan berantai itu memang berasal darinya. "Iya benar tulisan saya, kak," kata MS melalui pesan singkat kepada Suara.com, Rabu. MS mengaku dirinya merupakan pegawai kontrak di KPI yang bertanggung jawab di divisi Visual Data. Ia mengaku ingin sekali ke luar dari KPI karena sudah tidak kuat menahan perundungan yang dialaminya. "Saya mau resign, sudah enggak kuat lagi," ucapnya.

Kejadian perundungan itu terjadi sepanjang 2021-2014 di mana dalam 2 tahun ia kerap disuruh-suruh untuk melayani rekan kerja. Padahal menurutnya kedudukan mereka setara sebagai pegawai. "Tapi mereka secara bersama sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh," ujarnya. MS menyebut sudah tidak bisa terhitung berapa kali teman-teman kerjanya itu melakukan

pelecehan, memukul, memaki tanpa ada perlawanan. Pasalnya ia kerap sendirian sementara rekan kerjanya beramai-ramai melakukan perundungan.

Puncaknya terjadi pada 2015 di mana MS dilecehkan oleh teman-teman kerjanya. Mereka bahkan berani menelanjangi MS. "Tahun 2015, mereka beramai-ramai memegang kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencorat-coret buah zakar saya memakai spidol," ucapnya. Kejadian tersebut membuat MS menjadi trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Bahkan menurutnya para pelaku mendokumentasikan tindakan pelecehan tersebut. "Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina, saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah," ungkapnya.

Pada 2016 ia sering jatuh sakit karena mengalami stres akibat perundungan serta pelecehan yang dilakukan teman-teman kantornya. Ia kerap tidak bisa menahan emosi hingga mempengaruhi terhadap daya tahan tubuhnya. MS mengaku berangkat ke Rumah Sakit Pelni untuk melakukan endoskopi pada 8 Juli 2017. Hasil dari tes kesehatan tersebut, MS mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada tahun yang sama, MS juga sempat mengikuti acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor bersama teman-teman kantornya. Ketika tidur, MS dibawa dan dilempar ke kolam renang oleh teman-temannya. Teman-teman kantornya hanya menertawakan MS yang basah kuyup pada pukul 01.30 WIB.

MS sempat mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email pada 11 Agustus 2017. Komnas HAM lantas membalas emailnya pada 19 September 2017 dan berkata bahwa apa yang dialaminya masuk ke dalam kejahatan tindak pidana. Karena itu Komnas HAM menyarankan supaya MS melaporkan ke pihak kepolisian. Ia baru melaporkan ke Polsek Gambir pada 2019. Akan tetapi petugasnya malah berkata agar MS membuat aduan ke pihak atasan terlebih dahulu. Akhirnya MS pun mengadukan pelaku ke atasannya sembari menangis. Ia menceritakan semua pelecehan dan penindasan yang dialaminya.

Pengaduan tersebut berbuah hasil dengan dipindahkannya MS ke ruangan lain yang dianggap 'lebih ramah' ketimbang ruangan sebelumnya. Namun para pelaku yang diadukan MS sama sekali tidak mendapatkan sanksi. Alhasil, MS

mendapatkan cibiran dan penindasan kembali. "Bahkan pernah tas saya di lempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis "Bangku ini tidak ada orangnya". Perundungan itu terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh," ungkapnya. Atas saran keluarga, MS konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stress dan frustrasi. Dari sana, MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

MS juga berupaya untuk meminta bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris hingga Deddy Corbuzier melalui Instagram pada Oktober 2020 namun hasilnya nihil. Melalui pesan berantai di WhatsApp juga ia meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, Menko Polhukam, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan perlindungan hukum. "Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk resign, tapi sekarang sedang pandemi Covid-19 di mana mencari uang adalah sesuatu yang sulit," ungkapnya. "Lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar, kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik."

3. <https://amp.suara.com/news/2021/09/02/105436/10-fakta-pelecehan-pegawai-kpi-kemaluan-dicoret-coret-sampai-minta-tolong-jokowi>

10 Fakta Pelecehan Pegawai KPI : Kemaluan Dicoret-coret Sampai Minta Tolong Jokowi



Suara.com - Pengakuan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengalami pelecehan seksual menjadi sorotan. Pegawai berinisial MS ini membeberkan telah dirundung dan dilecehkan sejak bekerja sejak tahun 2012. MS buka-bukaan dirinya telah dipukul sampai ditelanjangi oleh rekan-rekannya.

Perundungan itu terjadi sepanjang tahun 2012 - 2014, dimana dirinya mengaku diperbudak di tubuh KPI. Suara.com telah mengumpulkan fakta-fakta mengenai kasus perundungan dan pelecehan yang diduga dialami pegawai KPI ini.

1. Awal Kasus Pelecehan Terungkap

Kasus pelecehan pegawai KPI ini terbongkar melalui pesan berantai di WhatsApp. MS, selaku korban mengaku dirinya yang menuliskan kisah itu. MS mengaku dirinya merupakan pegawai kontrak di KPI yang bertanggung jawab di divisi Visual Data. Ia mengaku ingin sekali ke luar dari KPI karena sudah tidak kuat menahan perundungan yang dialaminya. "Iya benar tulisan saya, kak. Saya mau resign, sudah enggak kuat," kata MS melalui pesan singkat kepada Suara.com, Rabu (1/9/2021).

2. Minta tolong ke presiden Jokowi

MS berani membongkar pelecehan yang dialaminya setelah berkonsultasi dengan temannya. Sang teman berprofesi sebagai pengacara serta aktivis LSM. Dalam pesannya, MS meminta tolong kepada Presiden Jokowi atas kasus perundungan yang dialaminya. Ia mengatakan sudah tidak kuat mengalami berbagai jenis pelecehan yang traumatis. "Tolong Pak Jokowi, Saya Tak Kuat Dirundung dan Dilecehkan di KPI, Saya Trauma Buah Zakar Dicoret Spidol oleh Mereka," tulis judul pesan WhatsApp MS.

3. Diperlakukan Seperti Budak

MS menceritakan awal perundungan terjadi saat dirinya masih pegawai baru. Ia setiap hari diperlakukan seperti budak oleh rekan-rekannya pada tahun 2012 - 2014. Kala itu, MS diperbudak oleh pelaku berinisial RM yang bekerja dibagian Protokol KPI Pusat. MS diminta untuk membelikan makan oleh pelaku secara terus menerus. Padahal, kedudukan MS dengan pelaku itu setara. Namun, ia justru diperlakukan semena-mena, seperti diberi tugas untuk membelikan makan bagi pegawai. "Tapi mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh," ucap MS.

4. Pelecehan Seksual Jadi Puncak Perundungan

Perlakuan rekan-rekannya semakin tidak manusiawi. MS mengakui dilecehkan beramai-ramai oleh sejumlah pegawai KPI lainnya. Kepala, tangan, dan kaki MS dipegang oleh pelaku secara beramai-ramai. Pelaku bahkan memukul,

menelanjangi dan mencorat-coret testikel MS memakai spidol. Setelah itu, pelaku CL (eks divisi Visual Data, sekarang Divisi Humas bagian Desain Grafis) memotret alat kelamin MS yang sudah dicorat-coret. Perlakuan pelaku itu membuat MS menjadi sangat tidak berdaya. Ia takut foto itu disebarluaskan. "Saya tidak tahu foto yang masuk kategori pornografi itu sekarang disimpan di mana, yang jelas saya sangat takut jika foto tersebut disebarluaskan ke publik karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia," ungkapnya.

5. Korban Alami Perubahan Mental

MS mengalami perubahan pola mental akibat perundungan dan pelecehan yang dialaminya. Ia merasa stres, hina, trauma berat. "Perendahan martabat saya dilakukan terus menerus dan berulang ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan pelan," ujarnya. MS mengaku kerap kali berteriak-teriak pada tengah malam. Akibat stres itu pula, MS menjadi sering jatuh sakit. Keluarganya pun kerap mendapatkan imbasnya ketika MS sering tiba-tiba menggebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa alasan. Emosinya bergejolak ketika tiba-tiba mengingat akan tindakan tercela yang dilakukan oleh pelaku.

6. Terpaksa Bertahan di KPI

MS mengaku frustrasi karena tidak bisa mengundurkan diri. Hal ini disebabkan dirinya masih harus mencari nafkah untuk keluarganya. "Saya tidak tahu apakah para pria peleceh itu mendapat kepuasan seksual saat beramai-ramai menelanjangi dan memegang kemaluan saya, yang jelas saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk istri, ibu, dan anak saya tercinta," jelasnya.

7. Divonis Alami PTSD

MS mendatangi Rumah Sakit Pelnis untuk menjalani pemeriksaan kesehatan endoskopi pada 8 Juli 2017. Hasilnya, terlihat MS mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. MS juga divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau gangguan stres pasca trauma. Vonis ini ditegaskan saat dirinya berkonsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari pada tahun 2019.

8. Laporkan Kasus ke Komnas HAM

11 Agustus, MS mengadukan pelecehan dan penindasan ke Komnas HAM melalui email. Komnas HAM pun membalas email MS pada 19 September 2017.

Dalam balasannya tersebut Komnas HAM menyimpulkan kalau apa yang dilakukan pelaku terhadap MS merupakan tindak pidana sehingga harus diteruskan ke pihak kepolisian.

9. Laporan ke Polisi Diacuhkan

MS mengadukan tindakan para pelaku ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat pada tahun 2019. Akan tetapi, kala itu MS malah diminta petugasnya untuk mengadukan terlebih dahulu kepada atasan supaya permasalahannya diselesaikan secara internal. MS kembali mendatangi Polsek Gambir, Jakarta Pusat untuk yang kedua kalinya pada tahun 2020. Ia datang dengan harapan laporannya benar-benar diproses anggota kepolisian. Lagi-lagi tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pihak kepolisian. Malah anggota kepolisian yang menerima kehadiran MS tidak menganggap serius atas laporannya.

10. Respons Resmi KPI Atas Kasus Pelecehan

KPI Pusat akhirnya buka suara terkait adanya cerita seorang pegawai kontrak yang mengaku telah dirundung dan dilecehkan oleh teman-teman kantornya. KPI Pusat akan melakukan investigasi internal. KPI berjanji akan menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindakan tercela tersebut. Lembaga ini juga mengaku prihatin atas apa yang dialami MS dan tidak menoleransi apapun segala bentuk perundungan ataupun pelecehan seksual. “Turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun,” kata Agung dalam keterangan persnya yang dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).

4. <https://amp.suara.com/news/2021/09/02/180607/telanjangi-pegawai-pria-para-terduga-pelaku-masih-aktif-dan-berstatus-non-pns-di-kpi>

Telanjangi Pegawai Pria, Para Terduga Pelaku Masih Aktif dan Berstatus Non-PNS di KPI



Para terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan masih berstatus aktif sebagai pegawai Komisi Penyiaran Indonesia ([KPI](#)). Hal itu diungkapkan Komisioner KPI, Nuning Rodiyah. “Statusnya mereka adalah pegawai KPI, Non-PNS, Jalau aktif atau tidak, mereka masih aktif,” kata Nuning kepada wartawan di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2021). Bahkan kata Nuning, sebagian dari para terduga pelaku masih aktif bekerja. “Ada sebagian yang masih kerja, ada yang sudah tidak,” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan terduga korban berinisial MS, dia dilecehkan dan diperundung rekannya sesama pegawai KPI. Dia menuturkan ada delapan terduga pelaku. Nuning mengatakan belum dinonaktifkannya kedelapan terduga pelaku, karena harus melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu. “Karena kami belum bisa melakukan tindakan apa pun sebelum kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap,” jelasnya.

Kendati demikian, KPI akan menonaktifkan korban dan para terduga pelaku dengan alasan untuk mempermudah proses penyelidikan. “Karena setiap saat bisa dipanggil kepolisian, kalau kemudian terus menerus kami aktifkan di kantor, maka bisa jadi terjadi interaksi yang tidak diinginkan, ketidaknyamanan kerja dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan tertulis MS, para terduga pelaku adalah, RM (Divisi Humas bagian Protokol KPI Pusat), TS dan SG (Divisi Visual Data), RT (Divisi Visual Data), FP (Divisi Visual Data), EO (Divisi Visual Data), CL (Eks Divisi Visual Data kini menjadi Desain Grafis di Divisi Humas), serta TK (Divisi Visual Data). MS, adalah pegawai kontrak KPI, dia mengalami perundungan dan pelecehan oleh teman kantornya sejak 2012. MS menerima perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman kantornya mulai dari diperbudak, dirundung secara verbal maupun non verbal, bahkan ditelanjangi. Kejadian itu terus terjadi hingga 2014 sampai akhirnya MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) usai ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stres dan frustrasi.

"Kadang di tengah malam, saya teriak teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas, diriku tak sama lagi usai kejadian itu, rasanya saya tidak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia," kata MS dalam surat terbukanya yang dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).

5. <https://amp.suara.com/news/2021/09/15/141005/akui-dibully-netizen-dalih-kpi-belum-ambil-sikap-tegas-soal-kasus-pelecehan-ms-nanti-deh>

Akui Dibully Netizen, Dalih KPI Belum Ambil Sikap Tegas soal Kasus Pelecehan MS: Nanti Deh



Komisi Penyiaran Indonesia ([KPI](#)) belum memikirkan tindakan tegas apabila kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap pegawai berinsial MS benar adanya. Pasalnya, kasus ini masih berproses di kepolisian. "Nanti deh karena ini sedang proses ya. Pertama ini kan sedang proses hukum," kata Kepala Sekretariat KPI, Umri di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ([Komnas HAM](#)), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021). Atas hal itu, Umri meminta segenap pihak untuk bersabar hingga kasus ini terang benderang. Tak hanya itu, KPI juga tengah menghindari statmen dari para netizen di media sosial. "Jadi saya mohon teman-teman semua untuk bersabar karena kami menghindari statemen-statemen dari netizen ya yang luar biasa ke kami," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Mulyo Hadi Purnomo mengkalim, lembaganya ingin menyelesaikan masalah ini sesuai

jalur hukum yang berlaku. Untuk itu, terkait proses hukum, KPI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. "Proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, kami diundang ke Komnas HAM juga kami hadir sebagai bentuk komitmen kami. Kami ingin menyelesaikan masalah ini sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia," kata Mulyo. Dalam kasus ini, KPI juga melakukan investigasi internal. Ketika disinggung apakah ada upaya lain guna membikin kasus ini terang benderang, Mulyo menyebut: "Ya, kami tidak banyak melakukan upaya."

Komisioner KPI, Beka Ulung Hapsara mengatakan, pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu berkaitan dengan rangkaian peristiwa dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang menysasar MS. Tak hanya itu Komnas HAM juga menanyakan kepada KPI soal sikap dalam merespons kasus tersebut. "Kami juga meminta keterangan terkait peristiwa yang ada seperti apa detilnya, respon KPI menyikapi kasus yang ada, dan langkah-langkah yang sudah dan akan dijalankan ke depannya oleh KPI karena masih ada kebutuhan permintaan keterangan lebih detil dari KPI," kata Beka di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Beka melanjutkan, pihaknya tetap merujuk pada rilis atau pernyataan terbuka yang disampaikan MS dalam memeriksa pihak KPI. Atas hal itu, Komnas HAM menanyakan respons secara kelembagaan kepada KPI berkaitan dengan peristiwa tersebut. "Keterangannya terkait peristiwa yang ada, tahun berapa, kan ini kota didasarkan pada rilis yang sudah beredar di publik, bagaimana respons KPI secara kelembagaan," sambungnya.

Hanya saja, Beka belum bisa menyampaikan apakah ada perbedaan keterangan MS dengan pihak KPI secara kelembagaan. Sebab, Komnas HAM baru akan membandingkan keterangan MS dengan KPI. "Jadi kami baru tahap mengumpulkan keterangan, belum menganalisa terhadap keterangan yang dikumpulkan. Kami tak mau berspekulasi lebih jauh," sebut Beka. (Raihan Hanani).

6. <https://amp.suara.com/news/2021/09/01/200229/kpi-insvestigasi-internal-kasus-pegawai-pria-dipukuli-hingga-ditelanjangi-teman-sekantor>

KPI Investigasi Kasus Pegawai Pria Dipukuli hingga Ditelanjangi Teman Sekantor – 1 September 2021



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akhirnya buka suara terkait adanya cerita seorang pegawai kontrak yang mengaku telah dirundung dan dilecehkan oleh teman-teman kantornya. KPI Pusat akan melakukan investigasi internal dan bakal menindak tegas kepada pelaku apabila terbukti melakukan tindakan tercela tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat [Agung Supri](#) usai melaksanakan rapat pleno guna membahas cerita dari pegawai kontrak berinisial MS tersebut. KPI mengaku prihatin atas apa yang dialami MS dan tidak menoleransi apapun segala bentuk perundungan ataupun [pelecehan](#) seksual. "Turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau *bullying* terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun," kata Agung dalam keterangan persnya yang dikutip *Suara.com*, Rabu (1/9/2021). KPI disebutkan Agung bakal melakukan investigasi secara internal dengan cara meminta penjelasan baik dari MS maupun para pelaku. KPI juga mendukung aparat penegak hukum untuk turut serta menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti bersalah, maka pelaku akan diberi hukuman yang berlaku. "Menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) terhadap korban, sesuai hukum yang berlaku," ujarnya. Sementara itu, KPI juga bakal memberikan perlindungan, pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologis terhadap korban,

Sebelumnya, seorang pria berinisial MS mengaku telah menerima perundungan oleh rekan kerjanya sejak 2012. Ia mendapatkan tindakan pemukulan, makian, pelecehan hingga bahkan pelaku menelanjanginya dan mencorat-coret testis miliknya.

Cerita MS tersebut beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp dengan maksud meminta perhatian akan adanya tindakan pelecehan seksual di mana korban dan pelaku adalah sama-sama pria. *Suara.com* berusaha berkomunikasi dengan pria yang dimaksud melalui chat WhatsApp. MS membenarkan apabila pesan berantai itu memang berasal darinya. "Iya benar tulisan saya, kak," kata MS melalui pesan kepada *Suara.com*, Rabu. MS mengaku dirinya merupakan pegawai kontrak di KPI yang bertanggung jawab di divisi Visual Data. Ia mengaku ingin sekali ke luar dari KPI karena sudah tidak kuat menahan perundungan yang dialaminya. "Saya mau *resign*, sudah enggak kuat lagi," ucapnya.

Kejadian perundungan itu terjadi sepanjang 2021-2014 di mana dalam 2 tahun ia kerap disuruh-suruh untuk melayani rekan kerja. Padahal menurutnya kedudukan mereka setara sebagai pegawai. "Tapi mereka secara bersama sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh," ujarnya. MS menyebut sudah tidak bisa terhitung berapa kali teman-teman kerjanya itu melakukan pelecehan, memukul, memaki tanpa ada perlawanan. Pasalnya ia kerap sendirian sementara rekan kerjanya beramai-ramai melakukan perundungan. Puncaknya terjadi pada 2015 di mana MS dilecehkan oleh teman-teman kerjanya. Mereka bahkan berani menelanjangi MS. "Tahun 2015, mereka beramai ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencorat-coret buah zakar saya memakai spidol," ucapnya. Kejadian tersebut membuat MS menjadi trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Bahkan menurutnya para pelaku mendokumentasikan tindakan pelecehan tersebut. "Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina, saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah," ungkapnya.

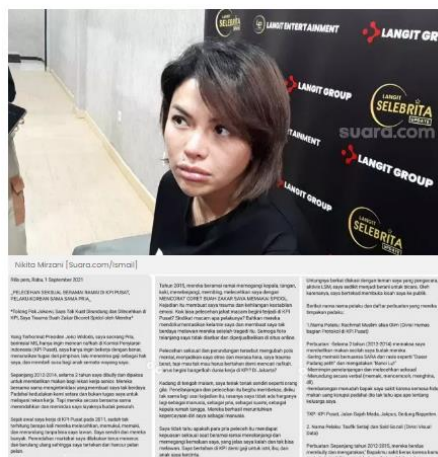
Pada 2016 ia sering jatuh sakit karena mengalami stres akibat perundungan serta pelecehan yang dilakukan teman-teman kantornya. Ia kerap tidak bisa menahan emosi hingga mempengaruhi terhadap daya tahan tubuhnya. MS mengaku berangkat ke Rumah Sakit Pelnis untuk melakukan endoskopi pada 8 Juli 2017. Hasil dari tes kesehatan tersebut, MS mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada tahun yang sama, MS juga sempat mengikuti acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor bersama teman-teman kantornya. Ketika tidur, MS dibawa dan dilempar ke kolam renang oleh teman-temannya. Teman-teman kantornya hanya menertawakan MS yang basah kuyup pada pukul 01.30 WIB. MS sempat mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email pada 11 Agustus 2017. Komnas HAM lantas membalas emailnya pada 19 September 2017 dan berkata bahwa apa yang dialaminya masuk ke dalam kejahatan tindak pidana. Karena itu Komnas HAM menyarankan supaya MS melaporkan ke pihak kepolisian. Ia baru melaporkan ke Polsek Gambir pada 2019. Akan tetapi petugasnya malah berkata agar MS membuat aduan ke pihak atasan terlebih dahulu.

Akhirnya MS pun mengadukan pelaku ke atasannya sembari menangis. Ia menceritakan semua pelecehan dan penindasan yang dialaminya. Pengaduan tersebut berbuah hasil dengan dipindahkannya MS ke ruangan lain yang dianggap 'lebih ramah' ketimbang ruangan sebelumnya. Namun para pelaku yang diadukan MS sama sekali tidak mendapatkan sanksi. Alhasil, MS mendapatkan cibiran dan penindasan kembali. "Bahkan pernah tas saya di lempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis "Bangku ini tidak ada orangnya". Perundungan itu terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh," ungkapnya. Atas saran keluarga, MS konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stress dan frustrasi. Dari sana, MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). MS juga berupaya untuk meminta bantuan kepada pengacara kondang Hotman Paris hingga Deddy Corbuzier melalui Instagram pada Oktober 2020 namun hasilnya nihil. Melalui pesan berantai di WhatsApp juga ia meminta perhatian

kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, Menko Polhukam, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan perlindungan hukum. "Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk *resign*, tapi sekarang sedang pandemi Covid-19 di mana mencari uang adalah sesuatu yang sulit," ungkapnya. "Lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar, kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik."

7. <https://jabar.suara.com/amp/read/2021/09/03/121422/kpi-tersandung-skandal-pelecehan-respons-nikita-mirzani-bikin-penasaran>

KPI Tersandung Skandal Pelecehan, Respons Nikita Mirzani Bikin Penasaran – 3 September 2021



SuaraJabar.id - Kasus dugaan [pelecehan](#) yang terjadi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia atau [KPI](#) sangat menyita perhatian publik. tak terkecuali dari kalangan selebritis. Salah satunya adalah [Nikita Mirzani](#). Ia mendadak mengunggah gambar di akun Instagram miliknya pada Jumat (3/9/2021). Gambar yang diunggah Nikita Mirzani merupakan tulisan KPI dengan latar hitam. Ia tak memberikan komentar apapun, namun perempuan yang akrab disapa Nyai ini menyisipkan emoji tertawa ngakak untuk caption. Entah apa maksud Nikita Mirzani dengan postingannya kali ini. Namun banyak netizen yang akhirnya berkomentar soal kasus pelecehan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "KPI sedang memanaskan dan tidak baik-baik saja, pantau terus kasusnya jangan sampai lengah,"

komentar netizen. "Miris banget baca artikelnya 10 tahun jadi korban buli," timpal yang lain. "Bubarkan lembaga ga berguna itu nyai," celetuk netizen lainnya.

Seperti diketahui, publik dibuat heboh dengan rilis yang ditulis pria mengaku pegawai KPI. Dia menceritakan kalau selama ini dibully hingga mendapatkan [pelecehan seksual](#) dari teman-teman kantornya. Dalam rilis yang ditulis korban, dia sempat menceritakan kalau pernah mengadu ke Hotman Paris dan Deddy Corbuzier. Upaya itu dia lakukan pada tahun 2020, setelah beberapa kali dia tak mendapatkan respons yang baik saat melaporkan tindakan pelecehan seksual ke polisi.

"Pada Oktober 2020, saya juga mengirimkan pesan ke pengacara kondang Hotman Paris dan mentalist Deddy Corbuzier untuk meminta tolong via DM Instagram," ungkapnyanya dalam rilis yang beredar di sosial media. Namun pesan sang korban tak mendapatkan respons dari kedua publik figur tersebut. Korban pun memaklumi karena mungkin kesibukan Hotman Paris dan Deddy Corbuzier. "Mereka berdua tidak merespon. Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat," tambahnya. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk membuat rilis ini agar [pelecehan seksual](#) yang dialaminya selama bertahun-tahun bisa mendapatkan keadilan.

Dalam rilis itu, korban mengaku sangat trauma bahkan sampai divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Rilis korban pelecehan di KPI Pusat ini pun diunggah banyak akun media sosial salah satunya @lets.talkandenjoy pada Kamis (2/9/2021). Banyak netizen yang mendukung korban agar kasus itu ditindak. Netizen juga berharap pelaku mendapatkan ganjarannya.

8. <https://amp.suara.com/news/2021/11/29/180025/pelecehan-pegawai-kpi-zoya-amirin-benar-benar-tak-sejalan-dengan-moral-yang-ditampilkan>

**Pelecehan Pegawai KPI, Zoya Amirin: Benar-benar Tak Sejalan
dengan Moral yang Ditampilkan**



Suara.com - Kasus dugaan [pelecehan](#) seksual dan [perundungan](#) yang alami oleh MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia ([KPI](#)) menjadi sebuah ironi. Di balik tugasnya sebagai lembaga pengawas siaran, yang menyensor konten-konten yang tidak bermoral atau tidak mendidik, tak menjadi representasi perilaku pegawainya yang diduga menjadi pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS. Hal itu diungkapkan oleh Psikolog, [Zoya Amirin](#), sekaligus ahli yang dilibatkan [Komnas HAM](#) dalam penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS pegawai KPI. “Ini ironis ya. Ada *double standard*, kalau saya melihat di sini. Kalau misalnya ini adalah orang (pegawai KPI) yang memiliki standar moral yang kayaknya tinggi, dengan menentukan mana yang cukup bermoral untuk kita tonton sehari-hari, tiba-tiba dia (pegawai KPI) tidak,” ujar Zoya kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).

Dalam temuan Komnas HAM, MS diduga kuat menjadi korban. Pegawai pria itu dilecehkan secara seksual dan di-*bully* oleh rekannya sesama pegawai KPI di divisi Visual Data. “Salah satu bagiannya dengan menampilkan tayangan-tayangan bermoral, harusnya sejalan dengan kondisi moral yang ada di dalam,” tegas Zoya. “Karena ini sebagian besar terduga pelaku itu adalah orang yang *incharge* di visual. Jadi mereka yang *nge-cut*, *nge-make sure* apa batasan-batasan yang lazim, enggak lazim, pantas, enggak pantas itu kan mereka yang *cut*,” sambungnya.

Zoya pun menyebut, kasus yang menimpa MS menjadi representasi lingkungan kerja di KPI yang tidak peka terhadap kesehatan mental. Tidak seperti yang diperlihatkan dalam kerja-kerjanya, melakukan pengawasan dalam penyiaran. “Benar-benar KPI enggak sejalan dengan moral yang

mereka tampilkan dan moral yang diberikan pada pekerjanya sendiri,” tegas Zoya.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara sebelumnya mengatakan dari hasil penyelidikan, diduga kuat MS mengalami pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja KPI. "Kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS dalam bentuk candaan atau humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi individu, kebiasaan dalam relasi antar pegawai di lingkungan KPI yang memuat kata-kata kasar dan seksis di lingkungan KPI," kata Beka saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin (29/11/2021). "Adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul," sambungnya. Komnas HAM juga menemukan peristiwa perundungan bukan hanya menimpa MS seorang. "Kuat dugaan peristiwa perundungan juga terjadi pada pegawai KPI lainnya namun hal ini dianggap sebagai bagian dari humor, candaan, lelucon yang menunjukkan kedekatan pertemanan rekan kerja," ujar Beka.

Atas temuan itu, KPI dinilai gagal memberikan perlindungan kepada pegawainya. "KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," ujar Beka. "Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja serta belum ada pedoman panduan dalam merespon serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja," jelas Beka.

9. <https://amp.suara.com/news/2021/11/30/185126/nestapa-mskorban-pelecehan-di-kpi-istrinya-ikut-depresi-hingga-keguguran>

**Nestapa MS Korban Pelecehan di KPI, Istrinya Ikut Depresi
hingga Keguguran – 30 November 2021**



Suara.com - Gangguan kesehatan mental yang dialami MS, pegawai [KPI](#), akibat dugaan [pelecehan seksual](#) dan perundungan yang dialaminya juga berdampak langsung kepada sang istri. MS mengatakan, istrinya mengalami keguguran pada 22 November 2021 lalu. "Tanggal 22 November istri saya keguguran," kata MS saat ditemui *Suara.com*, beberapa waktu lalu di Jakarta Selatan. Dia mengatakan, kandungan sang istri saat itu memasuki usia delapan minggu. "Tapi saat enam minggu janinnya tidak berkembang," ujar MS.

MS mengaku kondisi kesehatan mentalnya menjadi salah satu faktor istrinya keguguran. Keadaannya yang depresi memikirkan kasus yang dialaminya membuat sang istri turut terbebani. "Salah satu faktornya *mikiran* saya. Karena saya depresi gitu, terus kedua karena tertekan," ujarnya.

Diketahui, kasus pelecehan dan perundungan yang dialami MS menemukan babak baru. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM, diduga kuat perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya benar terjadi. Akibatnya MS menderita PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Di samping itu, MS juga secara konsisten memberikan keterangan yang saat beberapa kali menjalani pemeriksaan psikologi. Hal itu berdasarkan keterangan yang digali Komnas HAM dari psikolog LPSK dan psikolog Puskesmas Taman Sari yang sempat menanganinya. Kedua psikolog membenarkan, pernyataan MS dapat dipercaya, bahwa dia mengalami peristiwa pelecehan seksual.

10. <https://amp.suara.com/news/2022/01/07/214716/pulihkan-mental-ms-pegawai-kpi-korban-pelecehan-dipindahkan-ke-kominfo>

**Pulihkan Mental, MS pegawai KPI Korban Pelecehan
Dipindahkan ke Kominfo**



Suara.com - MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia ([KPI](#)) yang menjadi terduga korban [pelecehan](#) seksual dan [perundungan](#), dipindahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ([Kominfo](#)). Hal itu dilakukan guna membantu pemulihan psikologisnya. "Guna menghindari trauma berkepanjangan, untuk sementara MS akan ditempatkan dan bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga psikisnya pulih," kata Muallamin, kuasa hukum MS, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2021). Muallamin mengungkapkan, meski bekerja di Kominfo, kontrak kerja MS tetap berada di KPI. Kontrak kerja kliennya juga kembali diperpanjang. "Meski berkantor di Kominfo, status MS tetap sebagai pegawai kontrak KPI Pusat dengan masa kerja selama 1 tahun ke depan," jelas Muallamin.

Di sisi lain, delapan terduga pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS, diputus kontrak sebagai pegawai KPI. Hal itu disampaikan Komisioner KPI Hardly Stefano melalui keterangan tertulis pada Jumat (7/1/2021). "Benar, para terduga pelaku sudah tidak lagi dikontrak sebagai pegawai KPI," katanya.

Hardly mengemukakan, keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut MS diduga kuat dilecehkan dan diperundung oleh delapan pegawai

KPI. "Hasil penyelidikan Komnas HAM yang meyakini bahwa benar korban (MS) mengalami kejadian sebagaimana yang dilaporkan," ujarnya.

Pemberhentian delapan terduga pelaku dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi MS. "Perlu upaya pemulihan terhadap korban, salah satunya dengan tidak membiarkan korban berada dalam lingkungan kerja yang sama dengan terduga pelaku," kata Hardly. Kemudian pertimbangan lainnya, agar delapan terduga pelaku bisa fokus menghadapi proses hukumnya. "Laporan korban saat ini sedang ditindak-lanjuti, melalui proses penyelidikan oleh kepolisian," ujar Hardly. "Oleh sebab itu dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sebaiknya para terduga pelaku terlebih dahulu berkonsentrasi menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan," sambungnya.

Lampiran 3. Curriculum Vitae



SHINTA ANDREA PUSPA

Tangerang, 16 Agustus 2000

Handphone: 0859-2998-9530

Email: shintandreapuspa@gmail.com

Alamat: Jl. Karyawan 1 Gg. Majelis 3 No. 61 Karang Tengah, Kota Tangerang

LinkedIn: Shinta Andrea Puspa

TENTANG SAYA

Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan fokus Public Relations, yang memiliki motivasi serta semangat tinggi dalam bekerja. Saya suka berinteraksi dengan siapapun dan mempunyai kemauan untuk selalu belajar memperbaiki diri. Saya seorang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Saya memiliki kemampuan berbicara yang baik.

KEMAMPUAN

Media Sosial
Public Speaking
Event Planner
Content Planner
Marketing Relation

SOFTWARE

CANVA (80%)
FILMORA GO (80%)
MICROSOFT WORD (80%)
MICROSOFT POWER POINT (80%)
MICROSOFT EXCEL (70%)

PENDIDIKAN

- Universitas Pembangunan Jaya | Ilmu Komunikasi | 2018 - Sekarang
- SMA Negeri 3 Kota Tangerang | IPS | 2015 - 2018
- SMP Budi Luhur Karang Tengah | 2012 - 2015

PENGALAMAN FREELANCERS

Sejak tahun 2018 hingga 2020 saya pernah berkontribusi sebagai Freelancers untuk industri yang bergerak di bidang Frontliners Service (Sales Promotions Girl) yang bekerjasama dengan salah satu klien yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk.

- SPG Event Aqua Danone PT. Mitra Andal Sejati (MAS)
- SPG Event Kraft Festive PT. Mitra Andal Sejati (MAS)
- SPG Event Biskuat Academy PT. Mitra Andal Sejati (MAS)
- SPG Event Cadbury Dairy Milk PT. Mitra Andal Sejati (MAS)
- SPG Event Frisian Flag PT. Mitra Andal Sejati (MAS)
- SPG Event So-Good PT. Telemedia Indonesia (Brand Activation, EO)

PENGALAMAN EVENT ORGANIZER

- LO Event Bukber Telkomsel 2019
 - Mengkoordinasi tamu undangan
 - Mempersiapkan konsumsi
- LO Event Telkomsel Charity Event 2020
 - Mengkoordinasi tamu undangan
 - Mempersiapkan konsumsi
- PIC EO Event CAREEREERS Virtual Job Fair 2021
 - Membuat MoU untuk pihak eksternal
 - Membuat Talking Point seminar
 - Menjadi kontak personal Job Fair
 - Menjadi koordinator ticketing
 - Membuat Term Of Reference
 - Mengkoordinasi semua aspek penjalran kegiatan

Lampiran 4. Sertifikat LDK



Lampiran 5. Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-02
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Shinta Andrea Puspa
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041055
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DI PORTAL BERITA ONLINE (Analisis *Framing* Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com Periode September 2021 – Januari 2022)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.I.Kom	0417108507	Asisten Ahli
2	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc	0430049005	

Tangerang Selatan, 24 Juni 2022

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,	
			
Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi., M.I.Kom	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.

Lampiran 6. Formulir Pengajuan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Shinta Andrea Puspa
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041055
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DI
 (disusun dalam kalimat singkat, padat, jelas dan menarik minat pembaca) PORTAL BERITA ONLINE (Analisis *Framing* Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com Periode September 2021 – Januari 2022)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan, 24 Juni 2022

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
Shinta Andrea Puspa	Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.	Naurissa Biasini, S.St., M.I.Kom

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Lampiran 7. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi

	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Shinta Andrea Puspa
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041055
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI
 DI PORTAL MEDIA ONLINE (Analisis Framing Berita Kasus
 Pelecehan Seksual Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com
 Periode September 2021 - Januari 2022)
 Dosen Pembimbing : 1. Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi, M.I.Kom JAD: Asisten Ahli
 2. Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc JAD:
 Dosen Penguji : 1. Suci Marini Novianty, S.I.P., M.Sc.
 2. Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos., M.I.Kom.
 Jadwal Sidang : Jumat, 03 Juni 2022 Tempat : Ruang B

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	v	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	v	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	v	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	v	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	v	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	v	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	v	

Tangerang Selatan, 1 Juni 2022

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 Shinta Andrea Puspa	 Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc	 Naurissa Biasini, M.I.Kom	 Naurissa Biasini, M.I.Kom

Lampiran 8. Formulir Revisi Skripsi

➤ Penguji 1

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR REVISI SKRIPSI / TA	SPT-I/04/SOP-06/F-05
		No. Rekaman

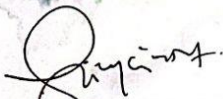
Nama Mahasiswa : Shinta Andrea Puspa
Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041086
Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DI
PORTAL MEDIA ONLINE (Analisis *Framing* Berita Kasus Pelecehan Seksual
Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com Periode September 2021 – Januari
2022)

Dosen Pembimbing : 1. Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi, M.I.Kom.
: 2. Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.
Dosen Penguji : 1. Suci Marini Novianty, S.I.P., M.Si.
: 2. Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos., M.I.Kom.
:
Jadwal Sidang : Tempat : Universitas Pembangunan Jaya Hari/Tanggal: 3 Juni 2022

Revisi yang dilakukan :

1. Menambahkan sub bab pada hasil penelitian
2. Merevisi dengan memperbaiki sumber pada latar belakang (terlampir pada BAB 1)
3. Merevisi perubahan judul sesuai arahan penguji
4. Memperbaiki bstrak dengan menyesuaikan hasil penelitian
5. Merevisi paragraf dan margin untuk dirapihkan dan diperbaiki
6. Merevisi dengan memperbaiki periode waktu yang dipilih (terlampir pada BAB 1)
7. Merevisi dengan menambahkan kriteria berita yang dipilih (terlampir pada bab 2)
8. Merevisi dengan menambahkan hasil analisis yang menerapkan framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki
9. Merevisi dengan menambahkan kutipan sumber pada BAB 4 di perangkat framing
10. Peneltti mengubah metode pengujian data

Tangerang Selatan, 3 Juni 2022



Suci Marini Novianty, S.I.P., M.Si.

➤ **Penguji 2**

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR REVISI SKRIPSI / TA	SPT-I/04/SOP-06/F-05
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Shinta Andrea Puspa
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2018041086
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DI PORTAL MEDIA ONLINE (Analisis *Framing* Berita Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI di Kompas.com dan Suara.com Periode September 2021 – Januari 2022)

Dosen Pembimbing : 1. Nathaniel Antonio Parulian, S.Psi, M.I.Kom.
 : 2. Maya Rachmawaty, S.Pt., M.Sc.
 Dosen Penguji : 1. Suci Marini Novianty, S.I.P., M.Si.
 : 2. Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos., M.I.Kom.
 :
 Jadwal Sidang : Tempat : Universitas Pembangunan Jaya Hari/Tanggal: 3 Juni 2022

Revisi yang dilakukan :

1. Merevisi judul sesuai arahan penguji
2. Merevisi latar belakang dalam menjelaskan signifikansi penelitian (terlampir pada BAB 1)
3. Merevisi pengujian data menjadi uji dependability dan transferability (terlampir pada BAB 3)
4. Merevisi dengan menyematkan dua tabel perbandingan framing (terlampir pada BAB 4)
5. Merevisi dengan menambah penjelasan terkait alasan memilih periode penelitian (terlampir BAB 1)
6. Menambahkan poin nilai berita pada BAB 3
7. Merevisi paradigma penelitian yang ditinjau dengan tujuan penelitian
8. Merevisi struktur sintaksis dengan menambah kutipan sumber terkait pemberitaan (terlampir BAB 4)
9. Merevisi saran akademik dan praktis (BAB 5)
10. Merevisi abstrak dengan menambahkan hasil penelitian yang signifikan

Tangerang Selatan, 3 Juni 2022



Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos., M.I.Kom